

## Tajuk

## Reshuffle Kabinet dan Meningkatkan Kepercayaan Publik

**PRESIDEN RI JOKO WIDODO** (Jokowi) kembali memberi sinyal mengenai rencana perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Menurut Jokowi reshuffle bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu.

Sebelumnya, Presiden sempat mengimbau semua pihak agar menunggu perkara kemungkinan reshuffle kabinet di sela-sela menjelang Pasar Tanah Abang Jakarta pada Senin (2/1). Saat itu Jokowi mengatakan kepada media, tunggu saja.

Jawaban serupa dilontarkan Jokowi saat disinggung kemungkinan perubahan komposisi partai politik di jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Sementara itu, di Jakarta isu perubahan komposisi kabinet menguat setelah muncul rumor bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate berencana mengundurkan diri dari jabatannya. Rumor itu tak bertahan lama karena Johnny segera merilis pernyataan bahwa hal tersebut tidak benar.

Johnny yang menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai Nas-Dem menegaskan kembali bahwa keputusan reshuffle kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi.

Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 sebelumnya sudah tiga kali mengalami perombakan oleh Presiden Jokowi. Pertama pada 23 Desember 2020, di mana terdapat enam pejabat baru untuk pos Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian pada 28 April 2021 Jokowi melakukan reshuffle kedua Kabinet Indonesia Maju dengan melantik dua pejabat baru untuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Selanjutnya reshuffle ketiga terjadi pada 15 Juni 2022 saat Jokowi melantik sejumlah pejabat baru untuk pos Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang(ATR)/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Kita berharap presiden segera mengumumkan reshuffle kabinet supaya publik tidak penasaran dan dunia usaha menunggu-nunggu atas kepastiannya. Juga agar tidak mengganggu proses kerja para menteri.

Publik dan rakyat menunggu dan menilai tepat Jokowi merombak kabinetnya karena memang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri Jokowi masih jauh dari yang diharapkan. Itulah sebabnya presiden untuk segera mengganti menteri yang tak bisa bekerja dengan baik dan memilih menteri sesuai kemampuannya agar bisa bekerja secara maksimal.

Publik memahami perombakan dilakukan karena Jokowi membutuhkan kerja sama yang baik di dalam kabinet untuk menjalankan pemerintahannya. Beliau pasti mencari orang yang bersikap pro untuk membantunya. Apalagi keadaan ekonomi seperti ini, dia butuh *team work* yang baik.

Presiden harus memanfaatkan perubahan Kabinet kali ini untuk menjadi Presiden yang sesungguhnya, yang punya kendali kuat ke para menteri. Dengan demikian para menteri itu loyal dan nurut kepada presiden dan tunduk kepada kepala pemerintahan, bukan kepada partai yang mengusungnya seperti selama ini.

Jadi, yang terpenting adalah menteri-menteri yang bisa bekerja sama dengan Presiden. Orientasi kerja dan kinerja tetap diutamakan dalam perombakan kabinet kali ini. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja.

Harapan kita Presiden tidak perlu ragu-ragu mengganti menteri yang tidak bersih, terindikasi korup atau yang terindikasi melakukan penggelapan pajak.

Pembersihan menteri seperti ini demi menjaga wibawa kabinet dan menjaga wibawa Presiden Jokowi sendiri sebagai pemimpin negara yang jujur dan bersih dari perbuatan tercela. Juga demi meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Jokowi.

Selain itu yang terpenting adalah, reshuffle perlu dilakukan terkait dengan kinerja para menteri saat ini masih mengecewakan. Diharapkan dengan pergantian itu kinerja pemerintahan akan semakin baik.

Publik berharap kinerja pemerintahan terus membaik. Juga berharap pemerintahan Jokowi melakukan perubahan dan lompatan ekonomi yang luar biasa. Melambanya ekonomi yang berdampak kepada melemahnya daya beli rakyat harus segera diatasi.

Dan tugas utama yang menyelesaikan masalah ini adalah para menteri di bidang ekonomi.

Sebagian besar masyarakat menginginkan sejumlah menteri yang tak mampu bekerja atau berkinerja buruk, berkualitas KW 3 atau dibawah standard, tentu layak diganti dengan menteri berkualitas.

Sekali lagi, perombakan kabinet memang perlu dilakukan Presiden Jokowi untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab kekecewaan masyarakat terhadap buruknya kinerja para menteri. (\*\*\*)

## CITIZEN JOURNALISM

## PERILAKU HIDUP SEHAT SEBAGAI RESOLUSI TAHUN BARU 2023

**MALAM PERGANTIAN** tahun telah berlalu, keriuhan yang terlihat di langit saat pesta kembang api telah memudar, sisa arang yang digunakan saat membakar ikan dan daging juga telah padam.

Matahari pertama di awal tahun telah bersinar, meskipun sebagian tertutup awan. 2023 baru saja dimulai, saatnya membuat resolusi dan target untuk satu tahun ke depan.

Setiap individu tentu memiliki berbagai keinginan dan cita-cita untuk merangkai kehidupannya pada tahun 2023. Arahnya tetap sama yakni kesuksesan, kebahagiaan, dan kesehatan.

Terkait kesehatan, akan sangat bijak jika komitmen untuk berperilaku hidup bersih dan sehat menjadi salah satu resolusi tahun 2023. Sebab, bagaimanapun juga, segala mimpi dan cita-cita dimulai dari raga dan jiwa yang sehat.

Lalu pertanyaannya, jika memiliki resolusi tahun baru 2023 untuk hidup lebih sehat, bagaimanakah cara untuk memulainya?

Hal pertama yang perlu menjadi catatan adalah komitmen, karena resolusi, cita-cita, keinginan, target, dan rencana apapun itu tidak akan bisa terwujud tanpa adanya komitmen yang kuat dari diri sendiri.

Setelah komitmen tersebut terbentuk, mulailah dari beraktivitas fisik atau berolahraga rutin dengan rentang waktu 30 menit setiap hari, minimal lima hari dalam seminggu.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) Agus Suprpto menilai bahwa resolusi terkait aspek kesehatan sangat penting, dengan menyesuaikan kondisi masing-masing individu.

Masyarakat dapat menyesuaikan jenis olahraga dengan kondisinya, baik itu olahraga berat atau ringan, bisa dilakukan asalkan terukur dan sesuai dengan kondisi masing-masing.

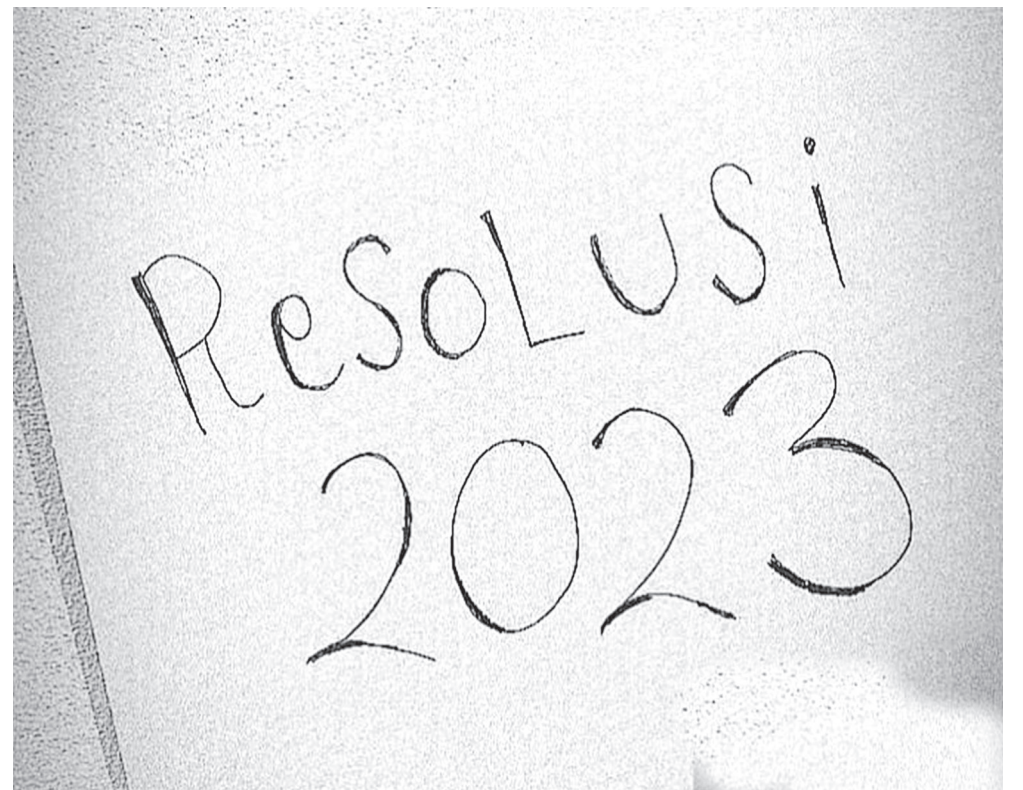
Kemudian, masyarakat juga dapat memulai dengan mengatur pola makan yang berimbang. Selain perlu banyak mengonsumsi buah dan sayur, masyarakat juga perlu membatasi asupan gula, garam, dan lemak.

Jika diperlukan, masyarakat juga bisa mengkalkulasi berapa banyak konsumsi gula, garam, dan lemak rata-rata per hari agar dapat terukur dengan baik.

Agus Suprpto mengemukakan bahwa masyarakat juga perlu melakukan pemeriksaan atau cek kesehatan secara berkala, mulai dari berat dan tinggi badan, lingkar perut, tekanan darah, kadar gula, fungsi mata dan telinga, hingga kolesterol.

Langkah tersebut bermanfaat untuk deteksi dini suatu penyakit agar jika ternyata ada masalah kesehatan maka dapat lebih mudah untuk ditangani.

Selanjutnya, yang juga tidak kalah penting untuk mendukung resolusi tahun baru, masyarakat juga



ILUSTRASI RESOLUSI TAHUN 2023

Antara

dapat mengelola stres dengan cara mengatur pola relaksasi dan mengalih energi positif pada setiap situasi. Artinya, jika sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan, maka jangan langsung merasa kecewa dan stres, tapi mencoba untuk relaksasi dan belajar mempercayai bahwa ada hikmah dan energi positif yang dapat diambil dari setiap kondisi

yang terjadi.

Selain itu, yang juga tidak kalah penting adalah tidak merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol guna mencegah efek buruk yang berpotensi terjadi pada tubuh.

Memprioritaskan kehidupan sehat memang seyogyanya menjadi komitmen seluruh lapisan masyarakat, karena aspek utama dalam

kehidupan adalah kesehatan.

Saat ini merupakan awal tahun, seseorang biasanya menyusun ulang resolusi kehidupannya, maka akan sangat bijak jika berani memulai langkah dan komitmen untuk menjalani tahun 2023 yang lebih sehat, baik jiwa maupun raga.

■ **Wuryanti Puspitasari/**  
**Antara**

## MENCERMATI SECARA BIJAK: NETRALITAS ASN MENJELANG PEMILU 2024

Oleh **Dr. Bambang Pujijono, MM., M.Si**

**SETIAP MEMASUKI** perhelatan politik akbar, eksistensi Aparat Sipil Negara (ASN) sangat menarik. ASN yang berada di birokrasi pada level pusat, provinsi, dan daerah menjadi incaran partai politik. Pada kondisi per 30 Juni 2022 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di instansi pusat dan instansi daerah yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah 4.344.552 dengan rincian jumlah PNS 3.992.766 (92%) dan 351.786 (8%) untuk PPPK.

Sangat masuk akal, karena ASN memiliki jejaring langsung dengan masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya. Hal ini bermakna bahwa ASN memiliki akses untuk kepentingan politik. Kondisi ini sangat didambakan oleh actor politik baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menipitikan pesan politik tertentu.

Posisi strategis ASN tersebut menjadi menarik, sehingga memunculkan praktik-praktik agensi politik yang menjadikan ASN berpihak pada kepentingan politik. Fenomena ini umum terjadi, sehingga dengan pertimbangan profesionalitas dalam melayani kepentingan public, maka ASN harus dalam posisi netral. Netralitas ASN ini secara tegas diatur dalam UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara. Salah satu asas netralitas secara eksplisit dinyatakan bahwa bahwa setiap ASN tidak berpihak pada pengaruh apapun dan

tidak memihak pada kepentingan tertentu (Pasal 2 butir h). ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi partai dan partai politik manapun (Pasal 9 ayat 2). Hal ini juga diperkuat dengan berbagai surat edaran yang menyatakan bahwa pejabat birokrasi tidak boleh melakukan kegiatan yang memihak calon tertentu.

Semenjak ditetapkan aturan main ini beberapa indikasi keterlibatan ASN dalam membawa kepentingan politik praktis masih terjadi. Sederet kasus pelanggaran yang dilakukan ASN pada masa kegiatan pemilu baik legislative maupun legislative seperti menjadi anggota parpol, menghadiri deklarasi kandidat pejabat public, menjadi juru bicara kandidat calon eksekutif atau legislative tertentu, membantu pengelolaan media kampanye, memberi dukungan dalam bentuk *gesture* yang terpajang dalam alat peraga public seperti *banner*, spanduk, baliho, dukungan fasilitas public untuk kepentingan kandidat tertentu. Pelanggaran dapat dilakukan secara fisik maupun non fisik dalam bentuk keterlibatan dalam menggunakan ruang digital dan teknologi untuk mendukung kandidat politik tertentu.

Pelanggaran yang dilakukan ASN tentu menjadi masalah serius, karena dapat mengganggu layanan public. Pemerintah memberikan instruksi kepada seluruh ASN untuk bersikap netral menjelang hajatan politik di tanah air. Secara normative dan seremonial biasanya langsung direspon dengan komitmen netral dalam bentuk penandatanganan ikrar netralitas di tiap level birokrasi ASN. Fenomena ini menarik dan memunculkan pertanyaan apakah ada garansi bahwa ASN dapat bersikap netral di tengah kehidupan masyarakat yang demokratis ini? Lantas posisi ideal seperti apa yang harus dimiliki oleh ASN dalam birokrasinya?

**Relasi Birokrasi dan Politisi**  
Di era masyarakat yang demokratis, kita dapat melihat irisan kepentingan fungsional antara birokrasi dan politisi. Karakteristik masyarakat yang demo-

kratis tentunya aspiratif, kritis, dan partisipatif menjadi modal untuk membantu mengoptimalkan birokrasi. Ketika birokrasi kurang menangkap aspirasi masyarakat tentu mendapatkan predikat yang negative. Birokrasi ini menutup diri bahkan mengisolasi diri dengan alasan menghindari intervensi politik. Dalam tataran masyarakat yang egaliter tentu bertentangan secara isolasi sudah tidak cocok lagi. Dalam konteks lain, birokrasi kadang kurang mendapatkan peran untuk mempertahankan draf kebijakan yang berkualitas, sementara ditahapan legislasinya (politik) harus kalah dengan politisi. Bahkan dalam implementasi kebijakan sering ditemukan sumber daya yang sangat minimalis diberikan oleh politisi kepada birokrasi sehingga berdampak pada kegagalan implementasi kebijakan public.

Bagi politisi, menggerakkan birokrasi untuk mewujudkan program politik yang diusung tentu sangat efektif. Birokrasi merupakan instrument penting dalam penyelenggaraan layanan public. Sangat rasional ketika politisi mencoba mempengaruhi birokrasi untuk mewujudkan kepentingan tersebut. Prinsip-prinsip good governance menjadi pintu masuk bagi politisi untuk mencoba mengintervensi birokrasi. Pada prinsip-prinsip tersebut jelas, partisipatori stakeholder (selain birokrat / ASN) sangat dibutuhkan dan ini merupakan substansi politik.

Dalam cermatan konseptual, muncul benang merah yang menjadi bukti bahwa terdapat relasi fungsi antara birokrasi dan politisi. Aktivitas birokrasi melanjutkan tahapan kegiatan politik. Politisi mengesahkan kebijakan, sementara birokrasi mengimplementasikan kebijakan. Kehadiran politisi di dalam birokrasi memiliki makna sebagai pengendur konflik karena merepresentasi kepentingan dari luar birokrat. Motif ini selama ini juga telah dibangun oleh para politisi yang kebetulan menjadi pimpinan birokrasi.

Dari pada perdebatan selama ini terus berkembang dan berulang hanya sebatas sikap netralitas ASN, menjadi lebih bijak jika mengede-

pankan kolaborasi antara birokrasi dan politisi dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan memberi kesejahteraan bagi public.

**Kolaborasi Politisi dan Birokrasi**

Di era pasca reformasi menjadi hal menarik ketika pengisian jabatan birokrasi dilakukan secara politis. Hal ini terjadi karena jabatan public diisi berdasarkan selera politik eksekutif di semua tingkatan mulai pusat, provinsi, sampai kabupaten atau kota. Eksekutif diisi oleh kandidat partai politik melalui mekanisme pemilu. Secara otomatis, birokrasi pun terjadi politisasi yang berdampak pada resistensi birokrasi itu sendiri.

Pada kondisi seperti ini, ASN dalam birokrasi akhirnya menjadi politisi dalam rangka menjaga eksistensi dalam struktur jabatan birokrasi. Banyak birokrat yang akhirnya rela membuat pilihan dan kehilangan jiwa administratifnya dan lebih memilih menjadi politisi dalam birokrasi. Sementara itu, politisi yang menjadi pimpinan birokrasi sengaja merawat politisasi birokrasi karena birokrat yang beranggapan ASN dapat menjadi armada tempur dalam kegiatan pemilu.

Menyadari bahwa antara politik dan birokrasi tidak dapat dipisahkan, sudah sepatutnya kedua institusi tersebut harus berkolaborasi. Kolaborasi dilakukan dengan pertimbangan besar bahwa masalah public yang akan dicarikan solusi oleh para politisi dengan menggunakan birokrasi sebagai instrumennya. Beberapa argumentasi berikut layak dipertimbangkan oleh kedua institusi untuk membangun tata kelola kolaboratif sehingga efektif dalam menjalankan pemerintahan di berbagai tingkatan.

Pertama, ASN harus memiliki komitmen kuat dan konsisten dengan tugas fungsinya dalam birokrasi. ASN sudah mendapat sumpah dan berbagai bimbingan teknis sehingga mampu bekerja secara professional dalam melayani kepentingan public.

Kedua, ASN harus menem-

patkan kolaborasi antara birokrasi dan politisi dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan memberi kesejahteraan bagi public.

organisasi modern tentu harus terbuka dengan kehadiran politisi sebagai pemimpinnya. Keterbukaan birokrasi ini menjadi pemahamannya, maka akan sangat bijak jika berani memulai langkah dan komitmen untuk menjalani tahun 2023 yang lebih sehat, baik jiwa maupun raga.

Dalam konteks ini, struktur, proses, dan aktor dalam birokrasi merupakan kunci untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengalokasikan sumber daya untuk kolaborasi secara keseluruhan dan untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya.

Semoga tulisan ini menjadi bahan renungan bersama seluruh komponen bangsa bahwa perdebatan netralitas ASN menjadi obyek yang semu. Sikap netral ASN nampaknya sangat sulit diwujudkan kecuali sebatas retorika dan seblabas semata. Realitanya, setelah pesta politik selesai birokrasi mengalami resistensi dalam fungsinya karena politisasi. Masyarakat tentunya memiliki ekspektasi tinggi kepada birokrasi professional siapapun actor (politik)nya, yang penting struktur organisasinya jelas, serta proses kerja yang lebih jelas selaras dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

■ **Penulis adalah**  
**Dosen Fisip Universitas**  
**Budi Luhur Jakarta**

HARIAN TERBIT  
Korac Aspirasi RakyatSejak 19 Juli 1972 di Jakarta  
Diterbitkan oleh  
PT. Astri Cahaya GemilangPemimpin Redaksi/Penanggungjawab:  
H. Ali Akbar Soleman Batubara

**Redaktur Cetak dan Online:** Anugrah Tri Hapsoro Aji, Arbi Krishadyanto, Hermansyah, M. Bachu, M. Zahroni, Romi Syahril, Zamzam Siregar | **Staf Redaksi:** Eka Putra FN, M. Danial Bangu, Safari Sidakaton, Sammy Edward W | **Layout:** Sadeli, Sony, Saefudin | **Sekred:** Titie Budhi Waty | **Pracetak:** Yono | **Iklan:** Sri Endah | **Alamat Redaksi/Tata Usaha:** Jl. Duri Raya, No.64, RT.006/RW.01, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11510 Telepon (021) 5683948, Fax: (021) 29336195 **Tarif Iklan:** Display Berwarna Rp 45.000/mmk, Hitam Putih Rp 35.000,-/mmk. | **E-mail:** hanter.online@gmail.com | **Website:** harianterbit.com | **Terbit enam kali seminggu** | **SIUPP:** No.093/SK/MENPENSUUPP/A.7/1986, tanggal 15 Maret 1986. ISSN. 0215-2975. | **Percetakan:** PT Aliansi Temprina | **Alamat:** Jalan Raya Benda 26C, Tangerang (isi di luar tanggung jawab percetakan).